

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XVI
JULI 2017



**PERPPU ORMAS
UNTUK MENJAGA DAN
MERAHWAT NKRI**

SALAM REDAKSI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam pernyataannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia saat ini mencapai 344.039 ormas, yang telah beraktifitas di segala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun di tingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Secara jernih seharusnya kita melihat langkah yang dilakukan pemerintah saat ini sesungguhnya bukanlah langkah untuk menghentikan atau mengkebiri kebebasan berpendapat dan berkumpul yang dijamin oleh UUD 45, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka sudah seharusnya ormas mentaati peraturan yang berlaku di republik ini serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh bangsa Indonesia dalam berbagai hal yang menyangkut dasar negara dan ketentuan hukum yang berlaku.

Redaksi Majalah Catra mengajak kita semua untuk menghargai sebuah proses demokrasi dalam sebuah bangsa, akan tetapi karena kita hidup di alam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah sepatutnya kita menjalankan fungsi sebagai bagian dari bangsa Indonesia dengan tidak bersikap kontra produktif terhadap arah pembangunan fisik dan manusia.

REDAKSI



**BOEDI OETOMO
ORGANISASI PERTAMA**



Boedi Oetomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang memiliki tujuan tentang kebangkitan nilai-nilai kebangsaan, Perppu ormas dibuat tentu bertujuan baik untuk bangsa ini agar organisasi yang ada di masyarakat paham akan tujuan bangsa ini

Redaksi

MAJALAH CATRA

Jl. Medan Merdeka Barat No.15

Jakarta Pusat - 10110

Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683

email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI



- 4 PERUBAHAN ADALAH KUNCI DARI KEUNGGULAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP



- 6 PENGUATAN PERADILAN DOMESTIK



- 8 KARBOL DAN MISTER DOOLLY

TAJUK UTAMA



- 11 PERPPU ORMAS UNTUK MENJAGA DAN MERAWAT NKRI

PROFIL



- 16 BRIGJEN TNI AFANTI S. ULOLI, SE, M.SI PUTRO GORONTALO YANG SELALU BERSYUKUR

KEBIJAKAN PEMERINTAH



- 18 KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGHAPUS SUBSIDI LISTRIK

INFO KITA



- 20 PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA KOMISI I DPR RI



- 21 KEDEPUTIAN BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGINDERAAN SELENGGARAKAN SEMILOKA BERSAMA UGM

TAHUKAH ANDA



- 25 APAKAH ANDA MENGENAL SETJEN WANTANNAS?

Inspirasi Bulan Ini

JADILAH ELANG JANGAN BEBEK

Suatu hari di Bandara Dubai, ada cerita seorang sopir taksi. Ketika taksi berhenti, hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa taksi itu begitu bersih dan mengkilap. Sang supir berpakaian kemeja putih, dasi hitam, dan celana panjang hitam melompat keluar dan mengitari mobil untuk membuka pintu penumpang bagi penumpangnya.

Dengan Bahasa yang baik dia menawarkan minuman, lagu dan rute terbaik menuju ketujuan.

Penumpang berkata,

"Saya kagum dan bertanya,' apakah kau selalu melayani pelanggan seperti ini?"

Abdul tersenyum ke kaca spion,

"Tidak, tidak selalu. Bahkan, sejujurnya ini saya lakukan dalam dua tahun terakhir.

Selama lima tahun pertama saya bekerja sebagai supir, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya untuk mengeluh seperti semua sopir taksi lainnya.

Lalu suatu hari saya mendengar sebuah cerita tentang "KEKUATAN PILIHAN."

Kekuatan pilihan bahwa Anda bisa memilih menjadi bebek atau elang.

"Jika Anda bangun di pagi hari mengharapkan untuk memiliki hari yang buruk, Anda akan mengecewakan diri sendiri. Berhenti mengeluh!"

"Jangan jadi bebek. Jadilah elang. Bebek hanya mengeluh. Elang terbang tinggi di atas kerumunan."

"Itu memukul saya dan membuka pikiran saya," kata Abdul.

"Ini adalah tentang aku. Selama ini saya selalu mengeluh, jadi saya memutuskan untuk mengubah sikap saya dan menjadi elang.

Aku melihat sekeliling, banyak taksi yang kotor, *driver* yang tidak ramah, dan pelanggan yang tidak bahagia.

Saya memutuskan untuk membuat beberapa perubahan, perlahan-lahan ... bertahap namun pasti. Ketika pelanggan saya merespon dengan baik, saya mengulangnya lagi."

"Tahun pertama saya sebagai elang, saya mendapatkan penghasilan dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tahun ini penghasilan saya naik empat kali lipat. Pelanggan saya selalu menelepon saya untuk menjemputnya kembali."

Abdul membuat pilihan yang berbeda. Dia memutuskan untuk berhenti menjadi bebek dan mulai terbang seperti elang.

Mulailah menjadi elang hari ini ... satu langkah kecil setiap

DESI

PERUBAHAN ADALAH KUNCI DARI KEUNGGULAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP



“Kemajuan tidak mungkin bisa dicapai tanpa perubahan, dan mereka yg tidak bisa merubah pikirannya tidak akan bisa merubah apapun” (G.B. Shaw).

Oleh : Laksda TNI Dr. Djajeng Tirto S

Setiap pemimpin apapun harus menjadi Manajer Perubahan. Sadar atau tidak, kita akan mengelola perubahan di sepanjang waktu, baik melalui orang, teknologi, informasi, atau sumber daya lainnya.

Manajemen adalah segala upaya dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan obyektif, optimum, efektif dan efisiensi, sedang perubahan merupakan pengelolaan sekarang dari yang kurang baik untuk menjadi yang akan datang lebih baik. Sehingga

Manajemen perubahan adalah proses terus-menerus untuk memperbaharui arah, struktur dan kemampuan organisasi beradaptasi untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah baik karena tuntutan internal maupun eksternal organisasi. Menguasai strategi dalam memajemen perubahan pada saat ini sangatlah penting, mengingat laju perubahan dirasakan semakin lebih cepat ketimbang masa-masa sebelumnya. Sudah saatnya para pemimpin perlu untuk menyelaraskan tentang perilaku organisasi dan perubahan organisasi dengan menjelaskan tentang apa, siapa, dimana, mengapa dan bagaimana perubahan organisasi berlangsung.

Dengan demikian, para manajer perlu melakukan pembinaan untuk suatu perubahan yang konstruktif pada seluruh organisasi sehingga mereka terdorong untuk mencoba dan menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang telah direncanakan. Kemampuan organisasi untuk bertahan hidup (survive) sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dihadapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan potensial yang akan terjadi di masa mendatang.

Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan jaman, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan usia organisasi tersebut tidak akan bertahan lama. Setiap organisasi yang mengabaikan konsep perubahan akan

mengalami dampak negatif yang timbul oleh karenanya. Organisasi modern dewasa ini harus menghadapi dan menyelesaikan sejumlah persoalan yang menyebabkan terciptanya kebutuhan akan perubahan internal organisasi.

Menurut Mc Calman, perubahan suatu organisasi memerlukan apa yang disebut dengan Perpetual Transition Management, yaitu suatu kerangka kerja manajemen transisi yang akan memberikan sejumlah pemahaman penting tentang apa yang memicu adanya perubahan-perubahan di dalam organisasi dan bagaimana organisasi tersebut bereaksi terhadapnya. Berbicara tentang manajemen perubahan pada esensinya adalah bicara tentang mengelola orang, yang akan bertumpu pada pengetahuan dan kemampuan kita untuk memotivasi manusia, tim kerja dan kepemimpinan.

TUJUAN PERUBAHAN

Tujuan perubahan disatu sisi untuk memperbaiki kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan disisi lain, mengupayakan perubahan perilaku anggota/karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Perubahan harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai hal agar manfaat yang ditimbulkan oleh perubahan harus lebih besar dari pada beban kerugian yang harus ditanggung. Tujuan suatu perubahan pada umumnya masih bersifat makro dengan jangka waktu relative panjang. Untuk itu, tujuan dijabarkan dalam jangka waktu lebih pendek dengan ukuran yang lebih spesifik dan konkret dengan menetapkan sasaran perubahan.

Sasaran perubahan dapat diarahkan pada struktur organisasi, SDM, teknologi, proses mekanisme kerja, pengaturan fisik dan budaya organisasi. Hampir semua orang yang berpikiran maju akan berorientasi pada suatu tujuan. Begitupun suatu perubahan akan ditolak jika hal tersebut

bertentangan dengan tujuan seseorang, dan sebaliknya jika perubahan tersebut masuk akal dan sejalan dengan tujuannya, maka orang tersebut akan bersedia terlibat dalam suatu perubahan secara positif.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN

Tidak semua perubahan yang terjadi akan menimbulkan kondisi yang lebih baik, sehingga dalam hal demikian tentu perlu diupayakan agar dimungkinkan perubahan diarahkan ke arah hal yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.

Transisi dari kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan suatu proses transformasi, yang tidak selalu berlangsung dengan lancar, mengingat bahwa perubahan-perubahan seringkali disertai dengan aneka macam konflik yang muncul. Disinilah arti penting dari manajemen pengelolaan, yaitu untuk mengawal agar proses transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan yang seminimal mungkin.

Perubahan berarti bahwa kita harus mengubah dalam cara mengerjakan atau berpikir tentang sesuatu. Dengan demikian perubahan membuat sesuatu menjadi berbeda. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, proses mekanisme kerja, SDM dan budaya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut antara lain (Wibowo:2006) :

- 1. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Perubahan:** ketidak amanan ekonomis, ketakutan atas hal yang tidak diketahui, ancaman pada hubungan sosial, kebiasaan, kegagalan kebutuhan untuk berubah, Iklim ketidakpercayaan, ketakutan akan kegagalan serta konflik pribadi.
- 2. Faktor Yang Menghambat Terjadinya Perubahan:** Kelambanan struktural dan kelompok kerja, tantangan keseimbangan kekuatan yang ada, usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil, terlalu fokus pada perubahan terbatas, ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada, persepsi terhadap revolusi informasi, demografis serta lingkungan dan sosial.
- 3. Faktor2 yang menyebabkan kegagalan perubahan:** Lemahnya dukungan atau *sponsorship* dari para pimpinan, resistensi dari anggota dan staf, resistensi dari manajer menengah, *corporate inertia and politic* serta keterbatasan anggaran, waktu, dan sumberdaya lainnya.
- 4. Faktor-faktor pendorong perubahan dalam organisasi:** Perubahan teknologi, sosial, politik dan lingkungan lainnya, persaingan yang semakin sengit dan global, pelanggan yang semakin menuntut, profil demografi yang berubah serta tuntutan pemegang saham yang meningkat.

PENDEKATAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Kemungkinan untuk mengimplementasikan perubahan agar tingkat keberhasilannya sangat meningkat apabila setiap orang yang terlibat didalamnya memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang akan terjadi, dan mengapa hal tersebut akan terjadi. Sebagai sebuah proses, perubahan tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut M. Nur Nasution (2010), perubahan pada sebuah organisasi dapat memicu timbulnya penolakan baik dari individu maupun dari organisasi itu sendiri.

Adapun pendekatan manajemen perubahan meliputi: Mengidentifikasi objek yang terkena dampak perubahan yang mungkin menolak perubahan, menelusuri sumber, tipe dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin ditemukan serta mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. Kebanyakan organisasi yang berhasil adalah mereka yang fokus pada seluruh aktivitas pekerjaan dalam melakukan perubahan.

Perubahan organisasi bukanlah proses sederhana yang harus mengenal perubahan kinerja organisasi. Namun demikian sebelum mengimplementasikan perubahan, ada tiga hal yang harus dipertimbangkan, yaitu: Bagaimana kita mengetahui adanya sesuatu yang salah pada keadaan sekarang ini, aspek apa dari keadaan saat ini yang tidak dapat tetap sama serta seberapa serius masalahnya.

STRATEGI DALAM MENCIPTAKAN PERUBAHAN

Strategi dan tindakan sangat penting dalam menciptakan perubahan. Strategi berorientasi pada perubahan yang kontinyu dan bersifat terobosan. Strategi tindakan adalah strategi yang inovasi dan dilandasi cara berpikir pengusaha/wirausaha. Ada beberapa hal yang menjadi pegangan dalam melakukan tindakan perubahan yaitu:(1) Jjangan abaikan strategi; (2) Tumbuhkan kesadaran bahwa setiap awal pasti sulit; (3) Bertindak cerdas dan rajin; (4) Warnai perubahan dengan mimpi besar; (5) Mempengaruhi orang lain; (6) Merencanakan ke depan; (7) Mengembangkan potensi, (8) Memperbaiki keterampilan; (9) Menjadi lebih efektif; (10) Berikanlah *value*; (11) Berorientasi bisnis; (12) Menghilangkan pemikiran yang salah; (13) Sebagai kekuatan pendorong Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas; (14) Mengubah pola pikir serta; dan (15) Menciptakan keunggulan dengan cara Mengimplementasikan proses perubahan melalui: disiplin diri, kerja sama tim, memanfaatkan teknologi serta orientasi pada tindakan nyata.****

PENGUATAN PERADILAN DOMESTIK



Oleh: Victorio Litaay
Ketua Forum Diskusi Akurat / Narasumber Setjen Wantannas

Mencari keadilan dengan jalan melaporkan atau mengajukan suatu persoalan hukum kepada lembaga peradilan adalah suatu hal yang wajar, namun menjadi persoalan tersendiri jika lembaga yang diberi laporan ialah lembaga peradilan internasional.

Setidaknya ada tiga hal pokok yang muncul kemudian, yaitu kewenangan lembaga peradilan internasional, dampak politis yang muncul dan dampak kasus tersebut terhadap ketahanan nasional. Sebagai catatan, rata-rata kasus yang dibahas di tingkat internasional melalui lembaga peradilan sering berhubungan dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), kemanusiaan, atau sengketa kedaulatan, dan yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa peradilan internasional mengambil bagian dalam penyelesaian kasus hukum oleh karena peradilan di dalam negeri atau peradilan lokal dipandang tidak memenuhi kebutuhan hukum.

Sebagaimana tersirat di atas, pembentukan peradilan internasional disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Dalam sisi penegakan hukum HAM dan hak negara misalnya, ada dua lembaga yang layak dibahas karena sangat aktif akhir-akhir ini. Kedua lembaga tersebut adalah *International Court of Justice* atau ICJ (Mahkamah Internasional), dan *International Criminal Court* atau ICC (Pengadilan Pidana Internasional).

Dibentuk tahun 1945, ICJ yang adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menangani kasus hukum yang melibatkan negara-negara anggota yang bersengketa. Khusus mengenai ICC, pengadilan ini dibentuk sebagai hasil konferensi Diplomatik di Roma tahun 1998, untuk mengusahakan penegakan HAM. Pembentukan ICC dituangkan dalam Statuta Roma, yang dikuatkan pada tahun 2010 melalui pertemuan di Kampala, Uganda, dengan memasukkan unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, hingga

kejahatan perang, sebagai bentuk pelanggaran yang ditangani ICC. Adapun ICC bertujuan untuk menerobos kekebalan hukum (*impunity*) pihak yang berkuasa, dan mengadili kejahatan kemanusiaan. ICC menangani persoalan yang dialami individu, dalam kaitan dengan pelanggaran hukum yang spesifik.

Pertemuan di Uganda ini selain signifikan sebagai pertemuan yang menegaskan jenis-jenis pelanggaran hukum yang ditangani ICC, juga menjadi penting karena menetapkan 17 Juli sebagai Hari Keadilan Internasional. Sepanjang sejarah adapula lembaga insidentil, seperti Lembaga Tribunal yang dibentuk untuk mengadili kasus-kasus kejahatan perang.

Akhir-akhir ini, beberapa pihak yang mengalami persoalan hukum di Indonesia mencoba mencari keadilan melalui lembaga peradilan internasional. Tim pengacara sekelompok orang yang menjadi terduga makar akan mengajukan gugatan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sebagaimana diberitakan beberapa media pada 3 April 2017. Tidak tanggung-tanggung, gugatan tersebut dilayangkan ke pengadilan internasional.

Pihak Polri merespon dengan menyatakan bahwa seharusnya gugatan terhadap penetapan tersangka dan sebagainya dilakukan melalui sistem peradilan di Indonesia saja. Di bulan Mei, tepatnya 16 Mei 2017, seorang tokoh ormas, melalui pengacaranya, menyatakan akan membawa kasus yang dituduhkan kepadanya sebagai tersangka, ke PBB, dan menyatakan bahwa telah diadakan pertemuan dengan komisioner hak asasi manusia PBB.

Jika kedua kasus tersebut diatas boleh dibilang sebagai kasus yang terjadi di dalam negeri antara tersangka dan aparat penegak hukum atau pemerintah, maka tidak sedikit pula kasus yang terjadi antara WNI dengan pihak asing. Salah satunya adalah kasus penembakan Tenaga Kerja

Indonesia (TKI) yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kasus penembakan ini, muncul wacana untuk mencari keadilan melalui peradilan internasional, walau tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma. Di samping individu, institusi seperti negara pun tidak asing dari persoalan hukum melalui lembaga peradilan internasional, seperti kasus Sipadan-Ligitan yang diselesaikan melalui jalur hukum internasional.

KEWENANGAN

Keinginan beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh pihak pemerintah atau penegak hukum, dalam mencari keadilan, dan membawa kasus mereka ke tingkat internasional bukanlah hal yang mudah. Mengajukan persoalan hukum ke tingkat internasional harus dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku. Peraturan yang ketat mengatur peran lembaga peradilan internasional dan lembaga peradilan domestik.

Secara umum, peradilan internasional hanya bisa dijalankan apabila kasus yang diajukan memang mengandung unsur kejahatan internasional, yang artinya tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum dalam negeri semata. Disamping itu, peradilan internasional juga hanya bisa berjalan apabila terjadi ketiadaan ataupun ketidakmampuan peradilan domestik dalam menangani kejahatan kemanusiaan. Peradilan internasional tidak bisa mengintervensi peradilan domestik, selama sistem hukum di negara tempat kejadian telah berfungsi sepenuhnya. Vonis yang dijatuhkan adalah merupakan independensi pengadilan.

Hal lain yang harus dipahami juga adalah bahwa kewenangan peradilan internasional harus didukung oleh kekuatan penegak hukum dari negara tempat kejadian atau dari pihak-pihak yang bersedia mengamankan keputusan tersebut. Kelemahan kewenangan lembaga peradilan internasional terletak pula pada dukungan setiap negara dalam membantu mengamankan dan menegakkan keputusan hukum yang diambil. Khususnya mengenai Statuta Roma.

Selain itu, dari sisi ratifikasi Statuta Roma, tidak semua negara meratifikasi atau mengikuti Statuta tersebut. Dalam beberapa kasus, di pengadilan Tribunal misalnya, pelaku kejahatan perang maupun negara serta lembaga yang melakukan kejahatan perang dapat tunduk pada keputusan Tribunal, karena pihak pemenang perang mendukung pengadilan.

DAMPAK POLITIS

Suatu kasus hukum pidana, akan cenderung menjadi semata-mata kasus hukum apabila diproses dalam koridor sistem hukum dalam negeri. Namun

akan memiliki dampak politis jika dibahas di tingkat internasional. Tuntutan hukum terhadap Kapolri misalnya, apabila dilihat dari sudut pandang hukum, tidak akan memiliki dampak politis sebesar apabila kasus tersebut diadili disebuah konteks peradilan internasional.

Sorotan publik serta pembentukan opini terhadap pemerintah Indonesia dan aparat hukum pastinya akan terbentuk seiring jalannya sidang di tingkat internasional. Munculnya kasus di tingkat internasional dapat memberikan ruang bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mempengaruhi publik. Pengaruh terhadap publik ini nantinya dapat pula mempengaruhi berbagai bidang di luar hukum, yang harus disadari, bahwa dampak politis yang muncul bisa saja bersifat positif atau negatif. Kemampuan di bidang ilmu hukum harus dibarengi kemampuan diplomasi, penguasaan teknologi, serta kehandalan penerapan teknik berkomunikasi. Dampak politis yang positif dapat terjadi apabila pihak tergugat dapat merespon tuntutan hukum secara baik hingga mempengaruhi keputusan hukum yang diambil.

Oleh sebab itu, kemampuan diplomasi harus dimiliki juga oleh para ahli hukum yang bertugas menangani perkara yang ada. Selain itu penguasaan teknik komunikasi publik di seluruh lini komunikasi yang ada di publik akan sangat penting. Dalam era teknologi informasi sekarang, menjadi bagian dari mereka yang menyuarakan kebenaran saja tidak cukup. Penyuaran kebenaran melalui langkah mengedepankan perlawanan hukum yang baik harus juga dibarengi dengan kemampuan menyampaikannya kepada publik yang beragam.

DAMPAK PADA KETAHANAN NASIONAL

Pada akhirnya, menampilkan dan menerapkan sistem hukum dalam negeri yang baik adalah satu-satunya cara untuk menguatkan kepercayaan publik. Keberadaan lembaga peradilan internasional akan menjadi bagian kecil dari sistem hukum umat manusia, apabila sistem hukum domestik sudah menjamin kepastian hukum.

Dukungan publik akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Publik awam akan memiliki kepercayaan penuh terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya bermuara pada ketaatan terhadap hukum. Aparat penegak hukum memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan tugas.

Adapun pihak yang kalah dalam sengketa hukum akan pada saatnya menerima keputusan hukum yang diambil di tingkat domestik. Masyarakat yang taat hukum akan memiliki sikap positif di dalam menghadapi berbagai potensi pelanggaran hukum, dan menjadikan pelanggaran hukum sebagai hal yang harus dihindari dalam menciptakan kehidupan yang menyejahterakan rakyat.

Selamat Hari Keadilan (Internasional)****



Foto: Internet

KARBOL DAN MISTER DOOLLYTUNTUNAN SESUNGGUHNYA

Oleh : Sutarno

Para penggiat di bidang pendidikan dan pembina karakter generasi muda saat ini mengalami kegalauan yang luar biasa

menyikapi perkembangan keadaan. Dalam dunia modern dan konsumtif, (maaf agak sarkas dan hiperbolik) katanya manusia sudah berubah menjadi mahluk yang tamak, egois, materialistis dan hidup penuh dengan ketegangan, kegelisahan, kekhawatiran, kecurigaan, penderitaan dan ketidakpastian. Nilai-nilai yang dahulu dipegang teguh dan mampu menjadi sandaran hidup, sekarang telah banyak ditinggalkan.

Tidak heran apabila para orang tua mengalami kecemasan memikirkan masa depan anak cucu mereka. Para orang tua mencemaskan tauladan dan contoh perilaku dalam masyarakat yang mempunyai karakter, kepribadian dan jati diri yang sesuai budaya timur serta cocok di era modern. Jajak pendapat Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akhir tahun 2016 memperlihatkan pandangan menurunnya nilai-nilai kepahlawanan masyarakat dan elite politik. Tercatat 50,6% responden mengungkapkan hal ini. Sebanyak 46,2% responden menyatakan nilai-nilai kepahlawanan tokoh politik, termasuk anggota DPR, masih lemah. Disamping itu terjadi penurunan ketahanan ideologi di 12 Provinsi dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu peringatan Hari Bhakti TNI AU pada tanggal 29 Juli 2017 ini dinilai publik sebagai momentum penting untuk mengingat jasa-jasa pahlawan dan menanamkan karakter dan jiwa rela berkorban untuk negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda.

SIAPA KARBOL DAN MISTER DOOLLY ?

Sebelum cerita Karbol, mengenal Mister Doolly yang dalam bahasa lisan atau ucapan sering di dengar dengan "Mr.Doolly", "The Doolles", "Doolly" yang merupakan panggilan populer bagi Kadet atau Taruna Akademi Angkatan Udara Amerika Serikat (*The United States Air Force Academy = USAFA*).

Sebutan tersebut sebagai penghargaan atas seorang penerbang militer Amerika Serikat yang begitu hebat dan luar biasa prestasinya dan akhirnya bisa mencapai pangkat jenderal yaitu Jenderal James Harold Doolittle (1896–1993).

"Mister Doolly" melakukan pengorbanan paripurna, seluruh jiwa raga. Menurut Mister Doolly, kemenangan bukan sesuatu hal yang datang tiba-tiba, perlu rencana serius, ketersediaan informasi serta ridha Yang Maha Kuasa. Misalnya saat pemboman terhadap Jepang pada pertengahan April 1942.

Sebuah operasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan semangat Amerika Serikat sekaligus membalas serangan Jepang ke Pearl Harbor, menggunakan 16 pesawat bomber B-25 Mitchell dari markas Skadron di San Francisco mampu menjangkau Jepang dengan target serangan di Tokyo, Yokohama, Yokosuka, Nagoya dan Kobe. Unit pertahanan udara Jepang terkejut, dan semua B-25 Mitchell tersebut lolos tanpa mampu di hadang, meskipun beberapa bomber tersebut jatuh di wilayah Jepang setelah kehabisan bahan bakar, bukan karena ditembak Jepang.

Serangan tiba-tiba ini menghancurkan sekitar 400 rumah dan menimbulkan korban tewas 50 orang, lebih dari 400 luka-luka. Ada yang jauh lebih penting, serangan itu telah mengangkat moral tentara dan warga Amerika Serikat, sehingga komandan serangan, James Harold Doolittle (waktu itu berpangkat Letnan Kolonel) dianggap sebagai pahlawan. Serangan tersebut telah membuat malu kepemimpinan militer di Jepang, maka empat satuan kelompok tempur dipindahkan dari Pasifik untuk mempertahankan pulau-pulau penting Jepang. Sehingga tidak heran apabila di tahun 1943 serangan udara berikutnya terhadap Jepang atas Kepulauan Kuril mencapai keberhasilan juga.

ISTIMEWANYA PAK KARBOL

Secara guyon, Karbol itu singkatan "karung bolong" atau karung yang berlubang, artinya apa saja masuk. Dalam tulisan ini yang di maksud Karbol adalah istilah atau sebutan di Lingkungan TNI Angkatan Udara. "Karbol" adalah sebutan untuk Taruna atau Kadet Akademi Angkatan Udara (AAU).

Setelah lulus nanti diharapkan mahir dan terampil serta kompeten di bidang tugas masing-masing. *Lha* iya... Siapa "Pak Karbol"...?

Oke...oke... Pak Karbol itu sebutan atau panggilan populer (Jawa: parapan) yang melekat pada Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdulrahman Saleh. "Karbol" dari bahasa Belanda "Krullebol" maksudnya "Si Kriting yang Cerdas".

Semasa Abdulrahman Saleh masih mahasiswa Kedokteran di "*Geneeskundige Hogeschool*" Batavia (sekarang "Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia"), dikenal sebagai

sebagai pemuda yang bertubuh tegap, tinggi, atletis, kulit sedikit gelap dengan rambut keriting.

Dikalangan para dosen yang kebanyakan orang Belanda, Abdulrahman Saleh dikenal cemerlang, inovatif sekaligus kreatif tidak kalah dengan kebanyakan mahasiswa Belanda. Salah seorang dosen Belanda sering memanggil Abdulrahman Saleh dengan Krullebol (Si Kriting yang Cerdas). *Lha*...Krullebol akhirnya di lidah orang Indonesia menjadi Karbol.

Atas inisiatif Letnan Kolonel Udara Saleh Basarah pada 1963, diusulkan agar sebutan Karbol



Gambar oleh : Google

mahasiswa istimewa dan menjadi satu-satunya ahli ilmu "Faal" pada zaman Hindia Belanda.

Sebagai mahasiswa senior dikenal juga sebagai orang yang menekuni radiotelegrafi. Pada zaman pendudukan Jepang, si "Krullebol" berhasil merakit stasiun radio amatir di asrama Salemba Jakarta. Stasiun radio ini sangat berguna untuk para pejuang gerakan bawah tanah pemuda-pemuda Indonesia selama 3,5 tahun pendudukan Jepang (antara lain para pemuda seperti Sutan Syahrir, Adam Malik dan kawan-kawan) sehingga siaran atau berita tentang kemerdekaan bisa dikabarkan ke seluruh penjuru pelosok tanah air bahkan sampai ke luar negeri.

Disamping itu si "Krullebol" juga dikenal sebagai mahasiswa yang menekuni mesin-mesin mobil dan mesin-mesin pabrik yang pada waktu itu boleh dikatakan langka. "Pak Karbol" sendiri lahir pada 1 Juli 1909 di Kwitang, Jakarta Pusat, tumbuh

digunakan sebagai sebutan Kadet di lingkungan Akademi Angkatan Udara.

Pada akhirnya karir Abdulrahman Saleh lebih memilih menjadi Prajurit TNI AU, dan pada saat Agresi Militer Belanda I, bersama Adisujipto diperintahkan terbang ke India menggunakan pesawat Dakota VT-CLA. Berhasil menerobos blokade udara Belanda menuju India dan Pakistan. Sekembalinya ke Indonesia, singgah di Singapura untuk mengangkut bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya. Pesawat *take off* dari Singapura pukul 13.00 dengan mengangkut total 9 orang, yakni :

1. Komodor Muda Udara Agustinus Adisujipto;
2. Komodor Muda Udara Prof. Dr. Abdulrahman Saleh;
3. Pilot, A.N Constantine, berkebangsaan Australia;
4. Co-pilot, R.L. Hazelhurst, berkebangsaan Inggris;
5. Juru Radio, Opsir Udara Adisumarmo Wiryokusumo;

6. Juru Teknik, Bhida Ram, berkebangsaan India;
7. Ny. A.N. Constantine;
8. Zainal Arifin, Atase Perdagangan RI di Singapura; dan
9. A. Gani Handonocokro

Sayangnya, saat mendekati Lanud Maguwo di Sleman, Yogyakarta sekitar pukul 16.30 dalam persiapan mendarat, tiba-tiba dari arah utara, diserang dua pesawat Kittyhawk milik Belanda yang diawaki oleh Letnan Satu B.J. Ruesink dan Sersan Mayor W.E. Erkelens. Akhirnya pesawat Dakota VT-CLA jatuh dan langsung terbakar di perbatasan Desa Ngoto dan Wojo. Semua orang di pesawat meninggal dunia, hanya A. Gani Handonocokro yang berhasil selamat.

NILAI TUNTUNANNYA DIMANA..?

Karbol...pemuda bertubuh tegap, tinggi, atletis, kulit sedikit gelap dengan rambut keriting, cemerlang, inovatif sekaligus kreatif. Mungkin pembaca, di dalam hati berguman...rasanya banyak anak negeri sekarang yang seperti itu. Betul sekali.

Negeri ini kaya dan melimpah pemuda yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Tetapi seperti yang bisa di lihat di media massa konvensional dan media massa sosial, lebih banyak yang menjadi "Tontonan" artinya sekedar sebagai hiburan dan hanya sekedar pertunjukan, bisa di lihat saja. Banyak yang cepat naik daun, tetapi juga cepat turunnya. Cepat semerbak berkembang mewangi, tetapi cepat layu diterpa badai jaman. Tidak bisa sekaligus sebagai "Tuntunan", sebagai tauladan, contoh perilaku dan ajaran bagi generasi berikutnya.

Istimewanya Pak Karbol, pada waktu itu sudah menjadi dokter, orang terdidik, mempunyai keahlian dan kompetensi. Pasti bisa hidup makmur dengan memanfaatkan keunggulan tersebut. Tetapi Si Karbol memilih ikut berjuang melawan penjajah, hingga akhirnya mengorbankan dan mengiklaskan jiwa raganya. Dua kata ini, pengorbanan dan keikhlasan, tampaknya tidak bisa dilepaskan dari karakter Pak Karbol dan Mister Doolly.

Pengorbanan dan keikhlasan bagi bangsa dan negara. Meskipun kadang mendapat cibiran, cacian, hambatan dan hidup sengsara tetap fokus pada bangsa dan negara. Ibarat pelaut di tengah samudra yang kehilangan peta hanya bisa memandang ke langit, harus tetap semangat mengendalikn arah perahu menuntun rakyat ke tujuan. Menemani langkah setiap orang menembus kemelut hidup menuju kebahagiaan. Membisikkan pesan agar selalu memenangkan pertempuran kehidupan dengan kejujuran dan kebenaran.

Jadikan hidup sebuah pertempuran panjang dengan pengabdian, pengorbanan demi kebahagiaan bersama. Memperjuangkan kemerdekaan, dituntunnya perbedaan menjadi kelebihan, hingga negeri puluhan ribu pulau,



Pak karbol sedang memberikan keterangan

ratusan bahasa juga berbagai suku bangsa dan keyakinan ini, hidup rukun serta damai.

Pahlawan sejati adalah sebuah *road map*, sebuah



Gambar oleh : Google

alur peta yang bisa berupa atasan, anak buah, orang tua, guru, ustads, sahabat, kolega, teman bermain, kawan curhat bahkan lawan bertengkar. Tak jarang menjadi musuh manakala salah satu khianati nurani, hilang akal, lupa norma, keluar aturan, hilang kendali. Kehidupan bera da ditengah rimba raya kesulitan, tempat matahari dan bulan hadir berbareng, tempat kapitalis dan liberalis muncul bersamaan. Berbagai ketidakberdayaan membuat terjerat lingkaran setan. Polusi udara beracun, banjir, letusan gunung, tsunami, kemiskinan, ledakan penduduk, pengangguran, kemacetan, korupsi, judi, narkoba, bentrokan, kebakaran, flu burung, flu babi, aids ...entah apalagi. Belum lagi di antara gedung tinggi pencakar langit, hotel mewah, mall-mall megah dan luas dan mobil mewah, puluhan ribu anak jalanan tak pernah mengenyam pendidikan sekolahan.

Nasib bangsa ini ditentukan oleh desah nafas sendiri dalam merebut kehidupan yang lebih sempurna. Kemakmuran ditentukan langkah kaki sendiri, cucuran keringat sendiri, kejujuran dan disiplin sendiri. Anak negeri ini semua adalah pengisi kemerdekaan. Berbuat baiklah untuk negeri tercinta, tanpa ditonjolkan atau dibarengi keinginan untuk terkenal. Jadilah Pahlawan. Berjuanglah untuk kemakmuran dan kemaslahatan Indonesia.

Hidup Indonesia.****



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN



PERPPU ORMAS UNTUK MENJAGA DAN MERAWAT NKRI

Suatu keputusan politik yang bernyali dan pantas diapresiasi, Presiden Joko Widodo mampu menjalankan politik Negara untuk menjaga tegaknya prinsip dan dasar bernegara dari rong-rongan kelompok, organisasi dan individu yang mengusung ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila dan Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus/kesepakatan rakyat Indonesia yang dirumuskan para tokoh/pendiri bangsa yang terdiri dan datang dari berbagai latar belakang untuk mewakili suara rakyat Indonesia, ada tokoh agama, intelektual, tokoh masyarakat, pejuang, tokoh ormas, tokoh politik yang mewakili berbagai kepentingan sudah mengambil keputusan bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan bentuk negara kesatuan final dan tidak perlu diperdebatkan dan diganggu lagi. Tokoh-tokoh bangsa tersebut antara lain: Ir. Soekarno, Muh. Hatta, H. Agus Salim, A.A. Maramis, KH. Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, dan tokoh lainnya yang terlibat

langsung maupun tidak langsung.

Bangsa ini telah diwariskan nilai dan bentuk negara yang sangat sesuai dengan keragaman wilayah, suku bangsa, agama, bahasa dan karakter masyarakat yang majemuk. Negara yang kuat harus memiliki nilai dan jalan hidup berbangsa dan bernegara yang tunggal untuk menjadi perekat, pengikat kebangsaan, sehingga tidak mudah dicerai-beraikan dan diadu domba oleh kepentingan-kepentingan tertentu baik kelompok, golongan dan identitas apapun. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab setiap estafet pemerintahan Republik Indonesia untuk menjaga, mempertahankan, merawat ideologi negara dari gangguan dan rong-rongan apapun yang mengancam apalagi menyerang secara nyata.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2017 produk hukum dari keputusan politik yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pegangan bagi penegak hukum untuk menindak, memproses, membubarkan organisasi, kelompok-kelompok, individu yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, harus benar-benar menjadi nyata dalam

prakteknya. Sehingga keputusan kebijakan yang baik dan sangat bermanfaat bagi negara yang sudah diambil oleh Presiden tidak hanya jadi macan kertas atau *lip service* saja. Lembaga Negara, Lembaga tinggi Negara, birokrasi mulai dari *level* pusat hingga *level* pemerintahan desa harus sejalan dengan keputusan Perpu Nomor 2 tahun 2017 sehingga efektifitas penerapannya dapat maksimal dan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Tujuan Perpu ini sangat jelas dan mulia dalam konteks bernegara, karena akan mendorong

Kesatuan Republik Indonesia. Namun dengan kekompakan, kerja keras dan konsistensi penegak hukum, pemerintah dan dukungan masyarakat luas melalui ormas-ormas, komunitas profesi, tokoh-tokoh agama, partai politik yang sadar akan kebangsaan, tokoh-tokoh masyarakat, intelektual akan dapat mensukseskan penerapan Perpu.

Siapapun warga bangsa Indonesia harus sudah meninggalkan perdebatan, perlombaan, apalagi menyusupkan dan mendirikan bentuk-bentuk ideologi lain dalam konteks gerakan untuk



Gambar oleh : Google

untuk mengkanalisasi energi seluruh masyarakat Indonesia kepada hal-hal yang positif terkait dengan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam kesejahteraan, pembangunan, kecerdasan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Masyarakat tidak akan mudah atau dijauhkan dari provokasi, hasutan-hasutan, gerakan-gerakan dari pemahaman individu, kelompok, organisasi yang bertentangan dengan nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Tentu ada kritik dari sebagian masyarakat yang tidak memahami pentingnya Perpu Nomor 2 tahun 2017 bagi bangsa dan Negara, dan perlawanan dari pihak-pihak yang mendapat manfaat materi, pengaruh dan kedudukan serta tujuan politik tertentu dari mengusung, menggunakan, membela pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara

menantang Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena hanya akan menyebabkan pertentangan, konflik dan kemunduran serta membuang energi bangsa untuk sesuatu yang tidak diperlukan lagi.

Sistem demokrasi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menyemai dan mengembangkan ideologi tertentu yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang dijalankan Indonesia harus tetap memegang teguh nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati kebernekaan dalam persatuan dan berpedoman pada UUD 1945. Lebih ironis lagi, ada kelompok tertentu yang sebenarnya sangat anti dan mengharamkan demokrasi, tetapi ketika secara politik dan posisinya sudah terpojok atau tidak menguntungkan justru berlindung dan

membenarkan segala gerakan dan tujuan politiknya atas nama demokrasi.

Negara berkewajiban mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan nilai-nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia tidak terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan oportunistik baik dari dalam maupun luar.

MENJAGA DAN MERAWAT NKRI

Menanggapi polemik di masyarakat terkait Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang saat ini masih dibahas di DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa terbitnya Perppu ini untuk menjamin dan menjaga keamanan negara dalam jangka sekarang maupun yang akan datang.

Penerbitan Perppu yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi itu, sesungguhnya bermuatan tetap menjaga kebebasan terhadap Ormas sehingga tetap berjalan seperti biasa dengan dilandasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah akan menjalankan Perppu sesuai koridor yang ada. Seperti diketahui, salah satu pertimbangan terbitnya Perppu karena UU Ormas dinilai tidak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. baik aspek substantif atau prosedural

Masyarakat yang mendukung menilai terbitnya Perppu saat ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan masyarakat yang pancasilais,

mencintai kebinekaan, makin merajut, merawat persatuan kesatuan, dan menegakkan eksistensi bangsa. Namun, bagi masyarakat yang kontra atau tak mendukung terbitnya Perpu beranggapan pemerintah terlalu berlebihan menyikapi demokrasi yang saat ini disuarakan sejumlah ormas. Masyarakat yang kontra terhadap Perpu tersebut juga mensiyalir ada "ketakutan" dengan munculnya ormas-ormas tertentu yang mengkritisi dan berseberangan dengan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada saat mengumumkan penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada hari Rabu (12/7/2017) mengatakan bahwa Perpu tersebut diterbitkan akibat situasi yang mendesak karena perkembangan terkini, sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas belum memadai.

Penerbitan Perpu ini, bagaimanapun juga, harus ditempatkan dalam konteksnya. Konteks yang dimaksud adalah komitmen pemerintah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandas pada Pancasila.

Perpu menampilkan ketegasan pemerintah untuk mengingatkan-menegaskan adanya koridor batasan bagi kebebasan berekspresi dan berkumpul. Ormas-ormas tidak dilarang beredar, begitu pun anggota-anggotanya tidak dibatasi hak berpendapat sejauh tidak bersinggungan dengan kepentingan nasional demi keutuhan NKRI.

Pro dan kontra terbitnya Perpu Ormas hendaknya disikapi dengan semangat demokrasi yang tidak melanggar norma-norma dan hukum yang berlaku. Semangat menjaga keutuhan NKRI harus menjadi hal utama.



Foto: Internet

Kedamaian Ada...
Ketika Kita Mau Menerima Perbedaan



Foto: Internet



www.nu.or.id



“
Ikatan sosial yang kuat akan menuntut kita untuk mengembangkan solidaritas.”

KH. Abdurrahman Wahid

Menjaga dan merawat NKRI merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa Indonesia, walau terkadang kita seakan lupa bahwa di sini semua ada: jutaan manusia, ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, dan ribuan budaya. Kalau kita mengerti kondisi bangsa kita, mengapa kita melihat orang lain sebagai lawan. Seakan-akan kita tidak diberi petunjuk-keteladanan para pendahulu. Lalu, siapa yang kita ikuti?

Mengamati kondisi yang demikian, ada tiga lapisan benteng pertahanan untuk membendung upaya memecah-belah keutuhan sebagai bangsa.

Pertama, benteng keluarga. Para orangtua harus memainkan peran keluarga, juga sebagai sekolah pertama, bagi putra-putrinya. Kepada mereka, salah satunya, perlu ditanamkan dasar-dasar kebangsaan dan persaudaraan yang meluas. Di sini, kata “saudara” jangan dibatasi hanya dalam ikatan darah, suku, atau kepercayaan. Tetapi harus diperluas lagi dengan ikatan sesama warga bangsa-negara.

Kedua, benteng institusi pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi perlu merespons

kondisi di tengah masyarakat terkini. Maka, selain memberikan pendidikan skill kepada siswa dan mahasiswa, juga penting untuk membuka wawasan nasionalisme mereka yang lebih filosofis. Tunjukkan kepada mereka keragaman nyata yang dimiliki bangsa Indonesia. Kaum cendekia adalah yang paling bisa diharapkan bisa merawat keragaman itu.

Ketiga, benteng masyarakat. lingkungan di masyarakat ibarat kolam ikan besar yang menampung jutaan benih ikan, yang ditetaskan keluarga dan lembaga pendidikan. Nilai-nilai yang disemaikan oleh keluarga dan perguruan tidak ada artinya apabila tercemari di masyarakat. Karena itu, masyarakat juga bertanggung jawab untuk menyaring bibit-bibit pemusuhan dan upaya pecah-belah.

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 ini merupakan ikhtiar kita untuk merawat dan menjaga keberlangsungan negara dan bangsa Indonesia untuk tetap ada besok dan selamanya. Negara dan bangsa ini tetap berjalan untuk mensejahterakan dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada anak dan cucu kita.****

PEMBUBARAN ORMAS ANTI PANCASILA



PERPPU TENTANG PEMBUBARAN ORMAS ANTI-PANCASILA

Setelah melalui serangkaian kajian, Presiden Joko Widodo akhirnya resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) Undang-undang tentang pembubaran ormas anti-pancasila

Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan itu ditandatangani pada 10 Juli 2017, dan diumumkan Menkopolhukam Wiranto pada Rabu (12/7)

PERTIMBANGAN TERBITNYA PERPPU

UU Ormas dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah ideologi ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, baik aspek substantif atau prosedur.

Pengertian ajaran dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, UU Ormas merumuskannya sempit hanya pada atheisme, marxisme dan leninisme

"Padahal sejarah Indonesia ada ajaran lain yang juga bisa menggantikan dan bertentangan dengan Pancasila, atau ajaran lain yang diarahkan mengganti ideologi Pancasila,"

YANG BARU DARI PERPPU

Menteri Hukum dan HAM berwenang "melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum" terhadap ormas yang "menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila"

Peringatan hanya akan diberikan sebanyak 1 kali dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan (sebelumnya pada UU Ormas tahun 2013 peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 kali)

Putusan pengadilan yang disyaratkan untuk membubarkan ormas sebagaimana dicantumkan pada Pasal 68 UU Ormas tahun 2013 telah dihapus dalam Perppu ini. Artinya, pemerintah tak lagi memerlukan pengadilan untuk membubarkan ormas.

Ilustrasi oleh Desi

PUTRA GORONTALO YANG SELALU BERSYUKUR

“Dimanapun kita ditempatkan dalam bekerja, tetap harus disyukuri. Lakukan yang terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing,”

Brigjen TNI Afanti S. Uloli, SE, M.Si



Brigjen TNI Afanti S. Uloli, SE, M.Si

Adalah putra Gorontalo yang mengawali pengabdianya sebagai prajurit TNI dalam Korps Infanteri di Komando Utama (Kotama) TNI AD antara lain di Kostrad, Kodam V/Brawijaya dan Kodam VII/Wirabuana. Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate Maluku Utara, Gorontalo dan Bone Sulawesi Selatan, karena besarnya pengaruh tanah kelahirannya yang juga menjadi tempat menyelesaikan pendidikan SD sampai dengan lulus SMU ini, maka karakter masyarakat Gorontalo yang Islami tampak pada sepak terjang dan pembawaannya sehari-hari sebagai figur prajurit TNI yang taat pada ajaran agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Gorontalo.

Setelah lulus dari SMA pada tahun 1981, Afanti mendaftarkan diri ke Akabri di Kodam XIII/Merdeka Manado, Sulawesi Utara dan diterima sebagai Taruna Akabri Darat (Sekarang Akmil). Pada tahun 1985, setelah merampungkan pendidikannya selama 4 tahun di Lembah Tidar Magelang, perwira remaja Afanti mendapatkan kepercayaan mengemban tugas di Kesatuan Infanteri Batalyon

507/Sikatan (Sekarang Yonif 500/Raiders) Kodam V Brawijaya di Surabaya. Disana ia selama 9 tahun bertugas dengan macam variasi jabatan yang dilakoninya mulai dari Komandan Peleton, Kasi 2/Operasi, Komandan KOMPI Senapan dan Kasi 1/Intelijen.

Sebagai prajurit Korps Infanteri, Afanti banyak mendapatkan penugasan ke daerah-daerah konflik. Dapat disebutkan disini diantaranya penugasan ke wilayah Timor Timur (sekarang Timor Leste) yang lebih dikenal dengan insiden Santa Cruz di kota Dili pada 12 November 1991, penugasan Aceh, Papua dan penugasan lain berupa pengamanan Ibu Kota pada tahun 1998, pada tahun 1999 melaksanakan pengamanan wilayah rawan mengatasi konflik horizontal di Ambon dan sekitarnya.

Di provinsi Maluku menjabat sebagai Dansatgaspam Yonif 413 Kostrad dan pada tahun 2000 melaksanakan tugas kembali di Ternate dan sekitarnya, di provinsi Maluku Utara menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Peangmanan (Dansatgaspam) Yonif Linud 501 Kostrad. Dalam penuturannya, dari keseluruhan penugasan tersebut yang memiliki keunikan dan tantangan menonjol bukanlah penugasan di daerah operasi militer seperti di Timor Timur dan Papua, justru penanganan konflik horizontal di Maluku dan Maluku Utara yang memiliki kesan mendalam karena satuan tugas belum dipersiapkan secara khusus untuk menghadapi konflik berkelanjutan sesama anak bangsa, yang telah mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa dan harta masyarakat, serta sarana prasarana umum di daerah konflik.

Bukan hanya penugasan di dalam negeri saja yang telah diembannya, Afanti pun telah menyambangi manca negara sebagai Atase Militer RI di Moscow Russia yang dikenal dengan sebutan negara Beruang Merah atau Tirai Besi. Sedikit informasi, negara tersebut memiliki 8 wilayah akreditasi yaitu Federasi Rusia, Finlandia, Mongolia, Latvia, Lithuania, Estonia, Belarus dan Ukraina. Dari kedelapan negara akreditasi tersebut, Afanti sangat mengagumi negara Finlandia yang merupakan negara muda di Eropa tetapi memiliki tingkat kebahagiaan warga negara yang sangat tinggi, demikian pula dengan kualitas dan sistem pendidikannya. Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan terbaik di

dunia. Sedikit mencermati sistem dan cara penyelenggaraan pendidikan di sana, siswa SD dan SMP hanya berada di sekolah selama 4 sampai 5 jam. Sedangkan untuk siswa SMA dan perguruan tinggi, kehadirannya hanya pada awal masuk sekolah saja. Melalui cara seperti ini, diharapkan siswa tidak stres dan kelelahan saat sekolah. Tidak ada tugas-tugas atau Pekerjaan Rumah (PR) serta waktu istirahat sekolah sampai 45 menit. Finlandia percaya bahwa kapasitas setiap siswa dalam belajar akan berhasil jika mereka memiliki waktu bersantai yang cukup. Sehingga saat belajar, pikiran mereka akan segar dan bisa fokus kembali. Sama halnya dengan waktu liburan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sistem yang diterapkan di Indonesia.

Brigjen TNI Afanti S Uloli, SE., M.Si., seorang Jenderal TNI AD pengagum *figure* Vladimir Putin sang Presiden negara Federasi Rusia ini mempunyai prinsip selalu mensyukuri setiap jabatan atau amanah yang diembannya, sehingga dalam setiap pelaksanaan tugas selalu diberi kelancaran dan kesuksesan. Kelanjutan karir suami dari putri Surabaya bernama Feranita Purnamasari, SH., dan juga bapak seorang putri (Almarhumah) dan dua orang putra ini, pada 2015 mendapat kepercayaan sebagai Pembantu Deputi urusan Pertahanan Keamanan, Kedeputan Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas).

Afanti dilantik sebagai Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan (Bandep Urs. Hankam) Kedeputan Pengembangan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Letjen TNI Waris pada 24 Agustus 2015 berdasarkan keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/662/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor: Kep-85/Sesjen/VII/2015 tanggal 20 Agustus 2015. Selama menjabat sebagai Pembantu Deputi, Afanti dikenal sebagai sosok yang ramah, praktis dan cukup produktif dalam perumusan hasil Pengkajian Daerah, Perkiraan Cepat, Rakertas dan Ramusmat juga kajian-kajian lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional, Bandep Urs. Hankam mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Pengembangan dalam menyelenggarakan pengamatan, analisis, evaluasi, dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek pertahanan dan keamanan serta perumusan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan aspek pertahanan dan keamanan yang terjadi, uraian tugas dan tanggung jawab ini telah diembannya dengan baik oleh Afanti.

Belum genap 2 tahun menjabat, Afanti yang saat ini sedang mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana Strata 3 pada Universitas Negeri Jakarta, kembali

mendapatkan amanah untuk menduduki jabatan baru sebagai Kepala Biro Umum Setjen Wantannas. Ia pun dilantik untuk kedua kalinya pada 10 Februari 2017 oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo. Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/75/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 dan Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017.

Walaupun jabatan baru ini terlihat lebih berat, namun Afanti selalu mensyukuri atas jabatan yang diembannya dan berusaha melakukan yang terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing.**** (Sesuai hasil wawancara oleh: Desi)

DATA DIRI

1. **NAMA :** Brigjen TNI Afanti S. Uloli, SE, M.Si
2. **PANGKAT/CORPS :** Brigjen TNI
3. **JABATAN :** Kepala Biro Umum
4. **KESATUAN :** Dewan Ketahanan Nasional
5. **TMT ABRI :** 1985
6. **TTL :** Gorontalo, 24 Desember 1961
7. **SUKU BANGSA :** Gorontalo
8. **AGAMA :** Islam
9. **STATUS :** Menikah
10. **PENDIDIKAN :** Strata 2
11. **JUMLAH ANAK :** 3 (tiga) orang

KECAKAPAN BAHASA :

1. **INGGRIS :** Aktif
2. **RUSIA :** Pasif

PENUGASAN DAERAH OPERASI :

1. Timor Timur 1991
2. Ambon 1999
3. Maluku Utara 2000

PENUGASAN LUAR NEGERI :

1. Rusia 2006
2. Mongolia 2007
3. Finlandia 2008
4. Polandia 2009
5. Afrika Selatan 2010
6. Brasil 2011
7. Croasia 2014

RIWAYAT JABATAN :

1. DANYONIF 413/6/2 KOSTRAD
2. DANYONIF LINUD 501/18/2 KOSTRAD
3. PABANDYAMIN SINTEL KOSTRAD
4. DANDIM 0808/BLITAR REM 081 / DSJ
5. WAASINTEL KASDAM V/BRW
6. PABANDYA A-31 DIT "A" BAIS TNI
7. ATASE MILITER RI DI MOSCOW / RUSIA
8. PABAN V/HUBLU SPAMAD
9. PABAN UTAMA B-6 DIT B BAIS TNI
10. DANREM 141/TP, DAM VII/WRB
11. PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANNAS)
12. BANDEP URS. HANKAM KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN
13. KEPALA BIRO UMUM

KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGHAPUS SUBSIDI LISTRIK

Oleh: Desi

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memutuskan bahwa mulai 1 Mei 2017, tarif listrik untuk pelanggan golongan 900 Volt Ampere (VA) mengalami kenaikan karena subsidiya dicabut.

Kenaikan tarif listrik mulai 1 Mei 2017 ini dikenakan untuk pelanggan listrik golongan 900 VA. Tarif listrik golongan rumah tangga mampu (RTM) ini naik seiring dengan pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. Pencabutan subsidi dilakukan dalam tiga tahap setiap dua bulan, yakni pada Januari 2017, Maret 2017 serta Mei 2017.

Pencabutan subsidi listrik tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero), yang mengatur penerapan tarif nonsubsidi bagi rumah tangga berdaya 900 VA, yang mampu secara ekonomi. Serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga.

Peralihan subsidi ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan jaringan listrik ke daerah tertinggal yang belum merasakan tenaga surya dari Pemerintah.

Saat ini terdapat rasio elektrifikasi Indonesia masih berada di angka 89,5 persen, masih ada 10,5 persen atau sekitar tujuh juta kepala keluarga yang belum mendapatkan listrik. Jika satu kepala keluarga beranggotakan empat orang,

berarti sedikitnya ada 28 orang yang masih menunggu adanya pasokan listrik ke rumah mereka. Dengan angka rasio elektrifikasi sebesar ini, Indonesia masih kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam ataupun Thailand. Indonesia hanya menang dari Filipina. Untuk itu, rasio ini harus ditingkatkan sehingga jumlah listrik yang dinikmati masyarakat bisa lebih merata.

Namun, untuk memberikan pemerataan listrik, Pemerintah membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sebab daerah yang harus dibangun jaringan listriknya sangat jauh dari pusat distribusi. Guna menutupi kebutuhan tersebut, maka anggaran yang selama ini diberikan kepada pelanggan RI-900 VA akan dicabut. Anggaran ini kemudian dialihkan demi membangun jaringan listrik.

Pada tahun 2015, subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA yang mencapai Rp. 49,32 Triliun (87 persen). Namun pada dua golongan pelanggan ini masih terdapat rumah tangga yang tidak layak disubsidi. Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4,1 juta yang layak diberikan subsidi.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Zulfanitra menerangkan, pemerintah tidak akan sekaligus mencabut subsidi tersebut. Namun, subsidi akan dicabut dalam tiga tahap, di mana tarif listrik per kilowatt-hour (KWh) setiap periodenya akan naik 32 persen.

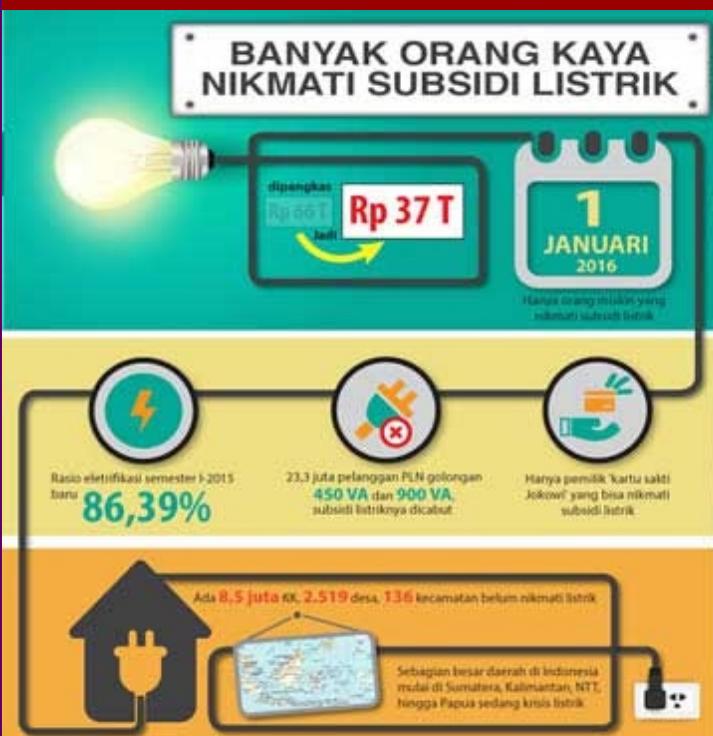
Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun menyebut, tagihan listrik bagi pengguna daya 900 VA sebesar Rp74.470 per bulan dianggap masih jauh dari harga keekonomiannya sebesar Rp185,79 ribu. Sehingga, pemerintah masih perlu mesubsidi tagihan listrik 23,04 juta pelanggan sebesar Rp111.234 per bulannya.

Sayangnya, besaran subsidi pemerintah itu justru lebih besar dibanding porsi tarif yang dibayar masyarakat. Subsidi itu kemudian terkesan mubazir setelah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa hanya 17,8 persen pengguna listrik 900 VA saja yang berhak menerima bantuan tersebut.

Menurut Kepala Unit Komunikasi dan

Harus diakui, besaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan subsidi tarif listrik selama ini memang cukup "menyiksa" ruang APBN. Bahkan, pada APBN 2014 angkanya pernah menyentuh Rp 94,26 triliun sebelum kemudian diupayakan turun melalui penerapan sejumlah kebijakan. Di tahun ini, pagu subsidi listrik ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 48,5 triliun.

Meski begitu, ditengarai masih ada banyak penyimpangan yang disebabkan oleh ketidaktepatan penerima manfaat subsidi. Terkait hal itu, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan hasil verifikasi PLN, tercatat hanya 4,1 juta dari total 23



Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel. seharusnya pengguna listrik 900 VA yang subsidinya dicabut tak perlu khawatir tagihannya akan naik. Ia beralasan, pengeluaran listrik hanyalah komponen kecil dari pengeluaran masyarakat pada umumnya. Pengeluaran tagihan listrik hanya mengambil porsi 1,54 persen hingga 2,96 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin selama sebulan. Jika pengeluaran listrik bagi golongan miskin saja tidak signifikan, seharusnya kenaikan tarif listrik bagi golongan mampu tak usah dipersoalkan.

Bahkan berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sebanyak 74 persen subsidi listrik dinikmati oleh golongan mampu. Oleh karena itu, diharap pelanggan listrik 900 VA mau berbesar hati jika tagihan listriknya naik.

juta pelanggan daya 900 VA saja yang layak disubsidi. Artinya, ditengarai sebanyak 19 juta pelanggan daya 900 VA sejatinya merupakan RTM yang semestinya tidak perlu disubsidi.

Langkah pencabutan subsidi ini tidak saja penting dalam kerangka menjamin penyaluran subsidi listrik tepat sasaran, tetapi kebijakan subsidi dan program pemerintah lainnya yang juga berorientasi pada (perbaikan kesejahteraan) penduduk miskin. Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa penyelenggaraan listrik bagi masyarakat harus tepat sasaran dengan tidak melupakan mensejahterakan seluruh masyarakat.**** (Diolah dari berbagai sumber)

PEMBAHASAN ANGGARAN BERSAMA KOMISI I DPR RI



Oleh: Yayat Ruhiyat

Senin (10/7/2017), Setjen Wantannas kembali hadir memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi I DPR-RI. Pembahasan kali ini adalah seputar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) APBN-P Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dan bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI. Undangan tersebut dihadiri oleh Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo dengan didampingi Pejabat Eselon I dan II. Dari pihak Komisi I DPR RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Meutya Viada Hafidz. Turut hadir sebagai peserta yaitu Kementerian Luar negeri, Lembaga Ketahanan Nasional dan Lembaga Sandi Negara.

Dalam paparannya, Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan RKAKL APBN-P diantaranya mengenai tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.168.653.282.000,- (seratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diurai ke

dalam 2 program kegiatan yaitu : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantannas sebesar Rp 57.483.282.000,- (lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp 111.170.000.000,- (seratus sebelas miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Lebih lanjut dijelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L Dalam Pelaksanaan APBN TA. 2017, tidak satu pun item kegiatan dalam anggaran Wantannas yang diblokir kaitannya dengan penghematan anggaran. Selain itu, Setjen Wantannas juga belum mengajukan penambahan anggaran.

Rapat berlangsung selama 3 jam dan menghasilkan kesimpulan bahwa Komisi I DPR RI menyetujui Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2017 Setjen Wantannas dan beberapa K/L lainnya yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran DPR RI.****

KEDEPUTIAN BIDANG PENKAJIAN DAN PENGINDERAAN SELENGGARAKAN SEMILOKA BERSAMA UGM

Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) mengadakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 11-14 Juli 2017, di The Sahid Rich Jogja Hotel dengan mengusung tema "Roadmap Tata Kelola Energi Daerah Berbasis Indeks Ketahanan Energi : Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta." Dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Teguh Prihantono, S.Sos berkesempatan mewakili Sesjen Wantannas membuka acara dimaksud.

Salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan energi nasional melalui program rancangan RUEN. Dijelaskan dalam program tersebut, pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan 102 rencana kegiatan antara lain terkait dengan survei potensi, pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) setempat, infrastruktur, pemanfaatan lahan untuk energi, konservasi dan efisiensi, peningkatan peran BUMD, peningkatan teknologi, penyediaan subsidi dan peningkatan sdm, khususnya isu-isu. Sesjen pun berharap bahwa persoalan tersebut bisa disinggung dalam semiloka.

Adapun tujuan dari penyediaan energi di daerah istimewa Yogyakarta disusun mengacu pada kenyataan bahwa kebutuhan energi Daerah

Istimewa Yogyakarta adalah dipasok dari sumber-sumber energi di luar provinsi Yogyakarta serta mempertimbangkan kapasitas energi terbarukan eksisting yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui penyusunan roadmap situasi energi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta proyeksi kebutuhan energi pada masa yang akan datang, diharapkan dapat dipakai sebagai contoh acuan bagi daerah lain yang belum menyusun RUEN.

KUNJUNGAN KE PT SRI REJEKI ISMAN

PT Sri Rejeki Isman (Sritex) adalah pabrik pembuat pakaian militer terbesar di Indonesia. Sritex telah memproduksi seragam militer untuk 100 negara, termasuk Indonesia. Selain itu, Sritex juga memproduksi pakaian untuk berbagai kebutuhan, antara lain seragam Korpri, kepolisian, hingga produk *fashion* lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Berdasarkan hasil kunjungan mata, dapat dibuktikan PT. Sritex mampu memproduksi seragam militer berbagai negara di dunia. Setiap negara memesan seragam dengan kualifikasi yang beragam, Sebagai contoh seragam anti radiasi yang dipesan Uni Emirat Arab dan Kuwait serta anti infra merah yang dipesan Jerman.

Selain itu, PT Sritex juga memproduksi seragam dengan kualifikasi diluar kebiasaan seperti pakaian seragam anti air, anti api, bahkan anti nyamuk. Beberapa produknya yang terkenal yaitu Zara, Guess, dan Timberland yang dihasilkan oleh PT. Sritex.**** (Oleh: Yayat Ruhayat)



Bob S. Effendi

Pendiri Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (APRONUKI)

MENTERI ESDM: TARGET 23% EBT SULIT TERCAPAI; PINTU NUKLIR TERBUKA



Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) mengatakan bahwa target 23% EBT akan sulit tercapai pada tahun 2025 sebagaimana di sampaikan dalam kata sambutan saat meresmikan French Renewable Energy Group pada 28 Februari 2017 di Kementerian ESDM.

Para pengamat energi mengatakan bahwa

Nasional, Opsi Nuklir harus menjadi pertimbangan untuk masuk dalam bauran energi sebelum 2025 sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014.

Dr. Andang Bachtiar, anggota DEN menjelaskan bahwa sesungguhnya masalah nuklir bukan lagi masalah teknologi ataupun keselamatan tetapi keputusan politik yang seharusnya dapat di

selesaikan dengan memberikan Presiden sebuah Peta Jalan yang komprehensif sehingga Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat. Permasalahannya selama ini semua Presiden Republik Indonesia selalu mendapatkan masukan yang tidak tepat bahkan dapat dikatakan menyesatkan tentang nuklir yang berakhir dengan keraguan Presiden dalam mengambil keputusan tentang PLTN. Jadi yang di butuhkan adalah: Konsideran, Peta Jalan dan *Time Frame*.

Bauran EBT meningkat rata-rata 0,36% setiap tahun



Sumber : ESDM

dengan laju pertumbuhan yang hanya 0,36% per tahun, maka diduga pada 2025 yang akan tercapai tidak lebih dari 10%.

Bahkan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2017 yang menyebabkan rendahnya minat investor masuk dalam sektor EBT, maka dapat dipastikan tanpa keraguan sedikitpun bahwa bauran EBT pada 2025 tidak akan lebih dari 10%. Hal ini akan menyebabkan target penurunan emisi sesuai dengan komitmen pada COP21 juga dapat di pastikan tidak akan tercapai.

Dengan tidak tercapainya EBT 23%, maka untuk menutup gap tersebut menurut Prof. Dr Tumiran anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang juga ikut menyusun Kebijakan Energi

APAKAH INDONESIA PERLU TENAGA NUKLIR, SEKARANG?

Pada akhirnya adalah perihal konsideran apa yang harus dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan untuk Indonesia memanfaatkan tenaga nuklir.

Apakah Indonesia Perlu Tenaga Nuklir Sekarang? itulah pertanyaan yang harus dijawab. Untuk menjawab hal tersebut ada beberapa konsideran yang menurut saya harus menjadi pertimbangan.

1. REGULASI

A. Kebijakan Energi Nasional (KEN)

Sampai saat ini konsideran yang selalu di pakai oleh Pemerintah dalam konsideran PLTN adalah masalah target pencapaian 23% EBT yang dituangkan dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN yang di awal tulisan sudah dibahas bahwa target EBT tidak akan tercapai tanpa keraguan.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Sebenarnya pemanfaatan tenaga nuklir sudah direncanakan dalam *blueprint* perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka

RUEN tersebut. Jelas target tersebut dengan *business-as-usual* mustahil dapat tercapai mengingat target 35 GW saja pada periode ini tidak dapat tercapai.

Kemudian yang lebih berat lagi adalah target RUEN pada 2050 adalah 430,000 MW artinya setiap tahun sesudah 2025 harus terpasang 12,000 MW atau dengan kata lain setiap pemerintahan harus membangun 60,000 MW.

Jelas sekali bahwa untuk mengejar target tersebut dibutuhkan membangun kapasitas dalam skala GigaWatt yang hanya dapat diberikan oleh



Menengah Nasional tahap III (2015–2019) yang menjadi Perpres Nomor 2 Tahun 2015 yang mana kedua regulasi tersebut memerintahkan bahwa PLTN perlu dibangun sebelum 2019 dan sudah beroperasi 2024.

C. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Ternyata Industri Nuklir di tempatkan sebagai industri andalan nasional dalam PP Nomor 14 tahun 2015 (RIPIN) yang perlu dibangun secara terpadu dengan industri logam tanah jarang. Dalam *time frame* yang dimasukkan dalam RIPIN bahwa rancang bangun PLTN sudah dimulai pada 2019 dan beroperasi pada 2024. Jelas hal ini selaras dengan RMJPN dan RPJMN.

2. PEMENUHAN ENERGI PRIMER

Target kapasitas terpasang yang ditargetkan dalam RUEN adalah 136,000 MW sementara pada 2019 ditargetkan sudah akan terpasang 70,000 MW. Maka, pada pemerintahan berikutnya (2019–2025) harus membangun sekitar 66,000 MW untuk mencapai target

nuklir yang dapat memberikan kontribusi 2–3 GW per tahun dengan mudah.

Dengan fakta dan konsideran di atas rasanya sudah menjadi keniscayaan bahwa PLTN harus dibangun bila Indonesia ingin menjadi Bangsa Pemenang. Indonesia harus mempunyai cita-cita besar, melalui sebuah tantangan inovasi dengan keluar dari zona nyaman sebagaimana selalu di sampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dimulai dengan BERHENTI MEMPOLITISASI NUKLIR dan mulai melakukan langkah-langkah kongrit menuju pembangunan PLTN dimulai dengan membuat Peta Jalan Pembangunan PLTN.****

(Sumber :

<http://mediaindonesia.com/news/read/94492/target-bauran-23-sulit-tercapai/2017-03-01>

RUEN: EBT Tidak Tercapai, Indonesia Akan Pakai Nuklir |)

SEJARAH KEPANGKATAN

Oleh: Desi



Captain General Teodoro de Croix

JENDERAL

Jenderal yang merupakan pangkat tertinggi dalam Angkatan Darat berasal dari bahasa Latin *Generalis* yang berarti “secara keseluruhan”. Maksudnya adalah, seorang General bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kekuatan tentara Angkatan Darat. Pada mulanya, pangkat ini disebut *Captain General*, yaitu seorang kapten yang memiliki komando dan memimpin secara keseluruhan. Pada abad ke-18 Inggris menyederhanakan pangkat tersebut

menjadi General saja. Seperti halnya pangkat yang lain, seorang General pun memiliki wakil dengan sebutan *Lieutenant General*. Tidak seperti sekarang, pangkat ini pun bukan jabatan permanen namun hanya bersifat sementara. Artinya, apabila General sedang berhalangan, maka seorang Colonel atau *Captain* pemimpin Regiment dapat ditunjuk untuk mengisi posisi *Lieutenant General*.

ADMIRAL DAN COMMODORE

Pangkat tertinggi dalam Angkatan Laut Indonesia disebut Laksamana, yaitu diambil dari nama adik Sri Rama dalam kisah Ramayana. Pangkat ini konon pertama kali diberikan kepada tokoh Hang Tuah dalam Sejarah Melayu. Dalam bahasa Inggris, pangkat Laksamana disebut dengan istilah *Admiral*.

Sesungguhnya istilah *Admiral* sendiri diambil dari bahasa Arab *Amir al-Bahr*, yang berarti “pemimpin lautan”. Pangkat ini digunakan bangsa Arab dalam Perang Salib sekitar abad ke-11, yang kemudian ditiru orang-orang Sicilia dan Genoa menjadi *Amiral*. Selanjutnya, pangkat ini dipakai oleh Inggris dengan istilah *Admyrall*, kemudian berubah menjadi *Admiral* seperti sekarang.

KOLONEL DAN MAYOR

Pangkat Kolonel bermula dari zaman King Ferdinand Raja Spanyol pada abad ke-16, di mana ia mengatur Angkatan Darat ke dalam dua puluh unit yang disebut *Colonelas*, dan masing-masing terdiri atas 1.000 sampai 1.250 tentara, yang dipimpin oleh seorang *Cabo de Colunela*, atau disingkat *Colonel*. Sistem ini kemudian ditiru oleh Prancis dan dikembangkan ke dalam bentuk *Regiment*. Selanjutnya, Inggris juga meniru sistem ini, serta meniru pula pengucapan Spanyol *Coronel*, bahkan kemudian berubah menjadi *Kernal*.

KAPTEN DAN LETNAN

Pembahasan tentang sejarah pangkat di mulai dari Kapten dan Letnan. Istilah Kapten berasal dari bahasa Latin *Capitaneus*, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Italia *Capitano*, dan bahasa Inggris *Captain* yang berarti “ketua”. Pada mulanya *Captain* adalah pemimpin kesatuan-kesatuan militer yang tidak terikat kepada suatu wilayah atau daerah tertentu, yang biasanya disebut *mercenary armies*. Pada zaman modern, istilah *mercenary armies* diartikan sebagai “tentara profesional bayaran” yang menjual jasanya kepada penawar tertinggi.

Kesatuan-kesatuan ini mengenal struktur organisasi sederhana, dengan kepangkatan yang berkaitan terhadap unit-unit tertentu. Dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang *Captain* dibantu oleh *Lieutenant*, atau dalam bahasa Indonesia disebut *Letnan*. Istilah ini berasal dari bahasa Prancis, *Lieu* berarti “tempat” sedangkan *tenant* berarti “pemegang”, atau dalam bahasa Inggris disebut *place holder*. Dengan demikian, apabila seorang *Captain* berhalangan, maka tempat kedudukannya bisa diwakili oleh *Lieutenant*.

SERSAN DAN KOPRAL

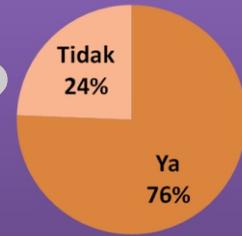
Pangkat terakhir adalah Sersan dan Kopral, yang masing-masing dalam bahasa Inggris disebut *Sergeant* dan *Corporal*.

Sergeant berasal dari bahasa Prancis *Sergent*, yang merupakan turunan dari bahasa Latin *Serviens*, yang berarti “orang yang melayani”. Sementara itu, *Corporal* berasal dari bahasa Italia *Capo Corporale*, yang berarti “head of the body” atau “kepala dari tubuh”. Istilah ini agaknya berkaitan dengan pekerjaan “bodyguard” atau “pengawal”. ****

APAKAH ANDA MENGENAL SETJEN WANTANNAS ?

Oleh: Enang Suhendar, S.Kom

Apakah Anda Mengenal Setjen Wantannas?



Apakah anda mengenal Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas)? Pertanyaan tersebut merupakan satu pertanyaan dari total enam pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang dibagikan kepada kurang lebih 75 peserta forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan oleh Setjen Wantannas setahun yang lalu, tepatnya pada 26 Oktober 2016.

Forum Tematik Bakohumas tersebut mengusung tema mengenai Penyelamatan Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dalam rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional. Adapun pembicara dalam kegiatan dimaksud adalah Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Pendidikan Kedepujian Pengembangan, Ir. Muhammad Iqbal, Msc.

Sejak bergabung menjadi anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah pada 2008 silam, Setjen Wantannas sudah lima kali menjadi tuan rumah penyelenggara Forum Tematik Bakohumas bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dari 75 peserta yang hadir, hanya 41 lembar kuesioner yang dikembalikan ke Panitia. Kuesioner dibagikan oleh Panitia dalam hal ini berada dibawah naungan Biro Persidangan dan Humas (sekarang bernama Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal) untuk mengukur seberapa jauh Setjen Wantannas dikenal oleh para praktisi dan staf humas sebagai sesama kolega di berbagai Kementerian/Lembaga.

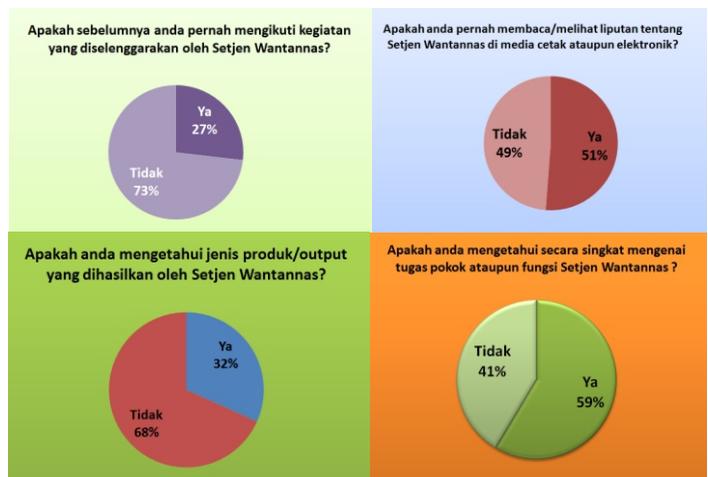
“Apakah Anda Mengenal Setjen Wantannas?” Sebanyak 76% menjawab Ya sedangkan 24% menjawab Tidak. Pertanyaan kedua adalah “Apakah anda mengetahui secara singkat mengenai tugas pokok ataupun fungsi Setjen Wantannas?” peserta sebanyak 59% menjawab Ya sedangkan sisanya sebanyak 41% menjawab Tidak. Sementara itu pertanyaan ketiga adalah “Apakah anda pernah membaca/melihat liputan tentang Setjen Wantannas di media cetak ataupun elektronik (TV, Media Online)?” sebanyak 51% menjawab Ya sedangkan 49% lainnya menjawab Tidak.

Selanjutnya terdapat 31,7% yang menjawab Ya pada pertanyaan “Apakah anda mengetahui jenis produk/output yang dihasilkan

oleh Setjen Wantannas?” Sementara sisanya, atau sebanyak 68,3% menjawab Tidak. Pertanyaan kelima adalah “Apakah sebelumnya anda pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Setjen Wantannas? Bila Iya Sebutkan...” pada pertanyaan ini sebanyak 31,7% menjawab Ya dan yang menjawab Tidak sebanyak 68,3%.

Pertanyaan terakhir pada kuesioner tersebut adalah pertanyaan esai yaitu “Sebutkan beberapa masukan untuk Setjen Wantannas agar dapat berkiprah lebih baik lagi bagi bangsa dan negara?” Beragam masukan ditulis oleh para peserta diantaranya memaksimalkan fungsi humas agar dapat mendiseminasi tugas dan fungsi Setjen Wantannas (*branding* dan publikasi kehumasan perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan *awareness* masyarakat).

Apabila dilihat beberapa masukan, mayoritas menyampaikan perlunya penguatan pada Humas Setjen Wantannas dalam melakukan publikasi dan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan, tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas terlebih dihadapkan pada era keterbukaan informasi publik. Kuesioner yang dibagikan tentu saja sangat bermanfaat khususnya bagi Humas Setjen Wantannas sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam mendukung penyelenggaraan program-program Setjen Wantannas pada khususnya, dan program pemerintah pada umumnya. ****





Oleh: Desi

Sering kali Anda membuat kulit tortila sendiri dirumah namun rasanya dan ketebalannya kurang pas. Nah, resep tortila homede ini pasti sangat pas untuk Anda praktekan dirumah. Yuk segera saja membuat kulit tortila yang enak, lembut dan empuk.

Bahan-Bahan :

400 gram tepung terigu, ayak
2 sdm baking powder
½ sdt garam
25 gram butter
250 ml air hangat
Minyak secukupnya

CARA MEMBUAT :

Langkah 1 : Uleni adonan

Ayak tepung dengan garam dan baking powder. Tambahkan potongan butter ke dalam tepung. Aduk dengan air hangat hingga semua adonan tercampur. Lalu uleni adonan dengan taburan tepung selama 7 menit. Bentuk bulat dan tutup dengan plastik. Diamkan selama 20 menit.

Langkah 2 : Hasil adonan setelah didiamkan

Setelah didiamkan selama 20 menit, maka adonan akan menjadi lemas seperti gambar diatas.

Langkah 3 : Potong-potong adonan

Potong-potong adonan menjadi beberapa bagian. Seperti gambar diatas.

Langkah 4 : Pipihkan adonan

Pipihkan adonan menjadi sangat tipis. Jika ingin membentuk adonan menjadi bulay bisa dicetak dengan mangkok atau piring kecil. Untuk ketebalan bisa disesuaikan dengan selera keluarga.

Langkah 5 : Goreng adonan tortila

Oleskan minyak pada teflon, tunggu hingga cukup panas. Masukkan adonan tortila yang sudah ditipiskan, masak dengan api sedang. Masak hingga tortila menggelembung, lalu balik untuk sisi lainnya, masak juga hingga menggelembung. Jika sudah matang tutup tortila dengan kain supaya tidak kering.

Tortila siap dihidangkan

Anda bisa mengkreasikan kulit tortila ini dengan isian berbagai macam sayur-sayuran, bayangkan bagaimana lezatnya. Atau bisa juga dijadikan kulit kebab dan yang paling simpel coba deh pasta bolognese ditambah irisan keju dimasukkan kedalam kulit tortila ini, hmm pasti lezat dan bikin nagih.

Selamat mencoba



**PELANTIKAN KEPALA BIRO PERSIDANGAN, SISTEM INFORMASI DAN
PENGAWASAN INTERNAL BESERTA PEJABAT ESELON II DAN IV LAINNYA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

SELAMAT HARI ANAK NASIONAL 2017



***ANAK ADALAH MASA DEPAN
BANGSA***